KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
PERHUBUNGAN DARAT

B-VI-55

Surat Dari	:	Ketua Tim Tata Usaha
Nomor Surat	:	
Tanggal Surat	:	
Perihal		Revisi I Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025
Diterima Tanggal	:	13/6/25
Diterima Pukul	:	15 : 34 WIB
No Agenda	:	B-VI-55

☐	KSD 1	SUBDIREKTORAT TERMINAL PENUMPANG
☐	KSD 2	SUBDIREKTORAT PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR
☐	KSD 3	SUBDIREKTORAT TERMINAL BARANG
☐	KSD 4	SUBDIREKTORAT JARINGAN DAN KEPENGUSAHAAN TRANSPORTASI JALAN
✓	KTU	KETUA TIM TATA USAHA
☐		SEKRETARIS SATKER
☐		PARA PPK
☐		SESPRI / ADC

ISI DISPOSISI

✓ Tindak Lanjuti	☐ Untuk Diketahui
☐ Tanggapan/Saran	☐ Untuk Dipelajari & Laporkan
☐ Harap Mewakili	☐ Untuk Diselsaikan & Laporkan
☐ Hadir Bersama Saya	☐ Untuk Dilaksanakan & Laporkan
☐ Siapkan Bahan	✓ Untuk Dikoordinasikan
☐ Jadwalkan	☐ Untuk Disiapkan
☐ Hadiri	☐ Sangat Segera
☐ Segera	☐ Untuk Ditanggapi

CATATAN DISPOSISI DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

- Pantau progres - ↗

13/6.

STOP PUNGLI

TONI TAULADAN, S.Si, M.T

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138
3506129, 3506145,
3506143, 3506127

FAX : (021) 3507202, 3506129
3506145, 3506143, 3506179
Email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Homepage : http://hubdat.dephub.go.id

NOTA DINAS

Nomor 242/DPTJ/VI/2025

Yth : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Dari : Direktur Prasarana Transportasi Jalan

Hal : Permohonan Tanda Tangan Konsep Revisi I Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Tanggal : 13 Juni 2025

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 86 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan serta Surat Sekretaris Jenderal Perhubungan Darat Nomor PR.002/2/10/DJPD 2025 tanggal 2 Juni 2025 Hal Pengumpulan Dokumen Revisi Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, bersama ini terlampir kami sampaikan konsep dokumen *hardcopy* Revisi I Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

Demikian kami sampaikan, mohon arahan dan petunjuk lebih lanjut.

Toni Tauladan, S.Si, M.T
NIP. 19700910 199703 1 002

Yth. Pak Dir.
- Dengan terbitnya PM No. 4/2025 ttg Ortaker Kemenhub dan adanya perubahan pimpinan organisasi Ditjen Hubdat, maka perlu adanya penyesuaian nomenklatur dalam PK Direktorat PTJ yg sebelumnya telah ditetapkan.
- Mohon perkenan persetujuan dan tandatangan Dokumen Revisi I PK.
- Tks

Yudie

Revisi I

Perjanjian Kinerja

DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

2025

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Revisi I Perjanjian Kinerja
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2025

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Dwiki Adhitya, S.ST.	Penelaah Teknis Kebijakan	27/5/25	
2.	Diperiksa	Tri Handoko Putro, S.Psi.,M.M.TR	Ketua Tim Pengelolaan Terminal Barang, Sub Direktorat Terminal Barang	28/5/25	
3.	Diperiksa	Susiani,A.Md LLAJ, ST, MT	Ketua Tim Rancang Bangun Terminal Barang, Sub Direktorat Terminal Barang, Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan	28/5/25	
4.	Diperiksa	Jekky Hendri, S,Sos,M.M.TR	Ketua Tim Analisis dan Evaluasi Terminal Barang, Sub Direktorat Terminal Barang	28/5/25	
5.	Disetujui	Riko Hanafi, ST, MT	Kepala Subdirektorat Terminal Barang	2/6/25	

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Revisi I Perjanjian Kinerja
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2025

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Danny Muhammad Muflih, A.Md LLAJ, S.Tr.Tra	Penelaah Teknis Kebijakan	27/5/25	
2.	Diperiksa	Junisar Cahyadi, ST	Ketua Tim Analisis dan Evaluasi Jaringan dan Kerjasama serta Kepengusahaan Transportasi Jalan, Sub Direktorat Jaringan dan Kepengusahaan Transportasi Jalan	28/5/25	
3.	Diperiksa	Muhammad Isrofi, ST, M.Tr.AP	Ketua Tim Pengembangan Jaringan Transportasi Jalan, Sub Direktorat Jaringan dan Kepengusahaan Transportasi Jalan	28/5/25	
4.	Diperiksa	Fitroh, ST, MT	Ketua Tim Tatanan Jaringan Transportasi Jalan, Sub Direktorat Jaringan dan Kepengusahaan Transportasi Jalan	28/5/25	
5.	Diperiksa	Rizki Fauzi Rahman, S.SIT, M.SI	Ketua Tim Kerjasama dan Kepengusahaan Transportasi Jalan, Sub Direktorat Jaringan dan Kepengusahaan Transportasi Jalan	28/5/25	
6.	Disetujui	Susanty Pertiwi, SS, M.HUM	Kepala Subdirektorat Jaringan dan Kepengusahaan	2/6/25	

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Revisi I Perjanjian Kinerja
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2025

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Syifa Azzaria, S.STAT	Statistisi Ahli Pertama	27/5/25	
2.	Diperiksa	Dian Ardhiya E, A.Md LLAJ, SE, M.M.Tr	Ketua Tim Analisis dan Evaluasi Penimbangan Kendaraan Bermotor, Sub Direktorat Penimbangan Kendaraan Bermotor	28/5/25	
3.	Diperiksa	Hariyanto, ST	Ketua Tim Rancang Bangun Penimbangan Kendaraan Bermotor, Sub Direktorat Penimbangan Kendaraan Bermotor	28/5/25	
4.	Diperiksa	Ayu Nilawati Agustina, SE., M.MTr	Ketua Tim Pengelolaan Penimbangan Kendaraan Bermotor, Sub Direktorat Penimbangan Kendaraan Bermotor	28/5/25	
5.	Disetujui	Handjar Dwi Antoro, ATD MT	Kepala Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor	2/6/25	

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Revisi I Perjanjian Kinerja
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2025

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	M. Alhafiq Wahyu Nabillah, S.T	Ahli Pertama - Pengendali Dampak Lingkungan	27/5/25	
2.	Diperiksa	Dede Suryanto, S.T	Ketua Tim Pengelolaan Terminal Penumpang, Subdirektorat Terminal Penumpang	28/5/25	
3.	Diperiksa	Fitriyani, S.H.,M.M.TR	Ketua Tim Analisis dan Evaluasi Terminal Penumpang, Subdirektorat Terminal Penumpang	28/5/25	
4.	Diperiksa	Y Prihantoko, S.T., M.Sc.	Ketua Tim Rancang Bangun Terminal Penumpang, Subdirektorat Terminal Penumpang	28/5/25	
5.	Disetujui	Yugo Kristanto, S.Si.T, M.T.	Kepala Subdirektorat Terminal Penumpang	2/6/25	

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Revisi I Perjanjian Kinerja
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2025

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Riska Mahanani Pratiwi, A.Md LLAJ, S.T.	Penelaah Teknis Kebijakan	27/5/25	
2.	Diperiksa	Yulie Wulandari, SE	Ketua Tim Kelompok Substansi Tata Usaha Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	28/5/25	
3.	Disetujui	Toni Tauladan, S.Si., M.T.	Direktur Prasarana Transportasi Jalan	2/6/25	

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Toni Tauladan, S.Si., M.T.
Jabatan : Direktur Prasarana Transportasi Jalan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si
Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Juni 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Direktur Jenderal Perhubungan Darat	Direktur Prasarana Transportasi Jalan
Dr. Drs. AAN SUHANAN, M.Si.	TONI TAULADAN, S.Si., M.T.
NIP. 19670131 202521 1 001	NIP. 19700910 199703 1 002

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Toni Tauladan, S.Si., M.T.
Jabatan : Direktur Prasarana Transportasi Jalan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si
Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Juni 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Direktur Jenderal Perhubungan Darat	Direktur Prasarana Transportasi Jalan
Dr. Drs. AAN SUHANAN, M.Si.	TONI TAULADAN, S.Si., M.T.
NIP. 19670131 202521 1 001	NIP. 19700910 199703 1 002

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
1	SK 3	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK 3.2.3	Rasio beroperasinya layanan terminal tipe A untuk mendukung konektivitas	Rasio	0.852
2	SK 4	Meningkatnya rasio konektivitas layanan angkutan barang dengan terminal angkutan barang	IKK 4.2.3	Rasio beroperasinya pelayanan terminal barang untuk mendukung konektivitas	Rasio	0.077
3	SK 7	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi jalan	IKK 7.1.3.A	Persentase beroperasinya layanan terminal tipe A dengan kapasitas sesuai SPM	%	90.47
			IKK 7.1.3.B	Persentase ketersediaan dokumen penyiapan KPBU oleh simpul KPBU	%	60
			IKK 7.1.3.C	Persentase tindak lanjut kerjasama pengusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman	%	60
4	SK 9	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 9.4.3.A	Terlaksananya pengawasan kendaraan angkutan barang di fasilitas penimbangan sesuai SPM	%	60
			IKK 9.4.3.B	Rasio beroperasinya fasilitas penimbangan untuk mendukung keselamatan	Rasio	0.636
5	SK 13	Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal	IKK 13.1.3.A	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,38
			IKK 13.1.3.B	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	82,3

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
1	SK 3	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK 3.2.3	Rasio beroperasinya layanan terminal tipe A untuk mendukung konektivitas	Rasio	0.852
2	SK 4	Meningkatnya rasio konektivitas layanan angkutan barang dengan terminal angkutan barang	IKK 4.2.3	Rasio beroperasinya pelayanan terminal barang untuk mendukung konektivitas	Rasio	0.077
3	SK 7	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi jalan	IKK 7.1.3.A	Persentase beroperasinya layanan terminal tipe A dengan kapasitas sesuai SPM	%	90.47
			IKK 7.1.3.B	Persentase ketersediaan dokumen penyiapan KPBU oleh simpul KPBU	%	60
			IKK 7.1.3.C	Persentase tindak lanjut kerjasama pengusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman	%	60
4	SK 9	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 9.4.3.A	Terlaksananya pengawasan kendaraan angkutan barang di fasilitas penimbangan sesuai SPM	%	60
			IKK 9.4.3.B	Rasio beroperasinya fasilitas penimbangan untuk mendukung keselamatan	Rasio	0.636
5	SK 13	Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal	IKK 13.1.3.A	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,38
			IKK 13.1.3.B	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	82,3

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
			IKK 13.1.3.C	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	94,10
			IKK 13.1.3.D	Indeks Pengelolaan Aset	Nilai	3,20
	SK 14	Meningkatnya Layanan Perkantoran	IKK 14.1.3	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	85,51

Kegiatan		**Anggaran**
1. Penunjang teknis transportasi darat	Rp.	46.489.102.000,00
2. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp.	610.670.000,00
3. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	20.633.254.000,00

Disetujui

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Dr. Drs. AAN SUHANAN, M.Si.
NIP. 19670131 202521 1 001

Jakarta, 2 Juni 2025

Direktur Prasarana Transportasi Jalan

TONI TAULADAN, S.Si., M.T.
NIP. 19700910 199703 1 002

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
			IKK 13.1.3.C	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	94,10
			IKK 13.1.3.D	Indeks Pengelolaan Aset	Nilai	3,20
	SK 14	Meningkatnya Layanan Perkantoran	IKK 14.1.3	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	85,51

Kegiatan		**Anggaran**
1. Penunjang teknis transportasi darat	Rp.	46.489.102.000,00
2. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp.	610.670.000,00
3. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	20.633.254.000,00

Disetujui

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Dr. Drs. AAN SUHANAN, M.Si.
NIP. 19670131 202521 1 001

Jakarta, 2 Juni 2025

Direktur Prasarana Transportasi Jalan

TONI TAULADAN, S.Si., M.T.
NIP. 19700910 199703 1 002

Lampiran I Nota Dinas Direktur Prasarana Transportasi Jalan
Nomor : 242/DPTJ/VI/2025
Tanggal : 2 Juni 2025

Uraian Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sehubungan dengan terbitnya DIPA Satker Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Nomor: DIPA-022.03.1.352597/2025 tanggal 02 Desember 2024 dan periode Tahun Anggaran serta Rencana Strategis periode 2025-2029 dan adanya perubahan nomenklatur sesuai PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan serta adanya perubahan pimpinan organisasi maka perlu ditetapkan Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

Program yang akan digunakan untuk mencapai Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan Sasaran Kegiatan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan adalah Program Infrastruktur Konektivitas dengan pagu awal sebesar Rp46.489.102.000,00 dan Program Dukungan Manajemen masih dengan pagu sebesar Rp21.243.924.000,00.

Lampiran II Nota Dinas Direktur Prasarana Transportasi Jalan
Nomor : 242/DPTJ/VI/2025
Tanggal : 2 Juni 2025

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	PIC
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)
1	SK 3	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK 3.2.3	Rasio beroperasinya layanan terminal tipe A untuk mendukung konektivitas	Rasio	0.852	Terminal Penumpang
2	SK 4	Meningkatnya rasio konektivitas layanan angkutan barang dengan terminal angkutan barang	IKK 4.2.3	Rasio beroperasinya pelayanan terminal barang untuk mendukung konektivitas	Rasio	0.077	Terminal Barang
3	SK 7	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi jalan	IKK 7.1.3.A	Persentase beroperasinya layanan terminal tipe A dengan kapasitas sesuai SPM	%	90.47	Terminal Penumpang
			IKK 7.1.3.B	Persentase ketersediaan dokumen penyiapan KPBU oleh simpul KPBU	%	60	Subdirektorat Jaringan dan Kepengusahaan Transportasi Jalan
			IKK 7.1.3.C	Persentase tindak lanjut kerjasama pengusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman	%	60	Subdirektorat Jaringan dan Kepengusahaan Transportasi Jalan
4	SK 9	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 9.4.3.A	Terlaksananya pengawasan kendaraan angkutan barang di fasilitas penimbangan sesuai SPM	%	60	Penimbangan Kendaraan Bermotor

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	PIC
			IKK 9.4.3.B	Rasio beroperasinya fasilitas penimbangan untuk mendukung keselamatan	Rasio	0.636	Penimbangan Kendaraan Bermotor
5	SK 13	Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal	IKK 13.1.3.A	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,38	Tata Usaha dan Seluruh Subdit
			IKK 13.1.3.B	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	82,3	
			IKK 13.1.3.C	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	94,10	
			IKK 13.1.3.D	Indeks Pengelolaan Aset	Nilai	3,20	
6	SK 14	Meningkatnya Layanan Perkantoran	IKK 14.1.3	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	85,51	Tata Usaha dan Seluruh Subdit

Lampiran III Nota Dinas Direktur Prasarana Transportasi Jalan
Nomor : 242/DPTJ/VI/2025
Tanggal : 2 Juni 2025

TABEL SEMULA MENJADI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2025 (Baseline)	Realisasi 2025	Target Renstra 2025	Target 2025	Keterangan
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
1	SK 3	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK 3.2.3	Rasio beroperasinya layanan terminal tipe A untuk mendukung konektivitas	Rasio	0.852	0.9223			
2	SK 4	Meningkatnya rasio konektivitas layanan angkutan barang dengan terminal angkutan barang	IKK 4.2.3	Rasio beroperasinya pelayanan terminal barang untuk mendukung konektivitas	Rasio	0.077	-			
3	SK 7	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi jalan	IKK 7.1.3.A	Persentase beroperasinya layanan terminal tipe A dengan kapasitas sesuai SPM	%	90.47	-			

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2025 (Baseline)	Realisasi 2025	Target Renstra 2025	Target 2025	Keterangan
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
			IKK 7.1.3.B	Persentase ketersediaan dokumen penyiapan KPBU oleh simpul KPBU	%	60	-			
			IKK 7.1.3.C	Persentase tindak lanjut kerjasama pengusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman untuk mendukung konektivitas	%	60	-			
4	SK 9	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 9.4.3.A	Terlaksananya pengawasan kendaraan angkutan barang di fasilitas penimbangan sesuai SPM	%	60	-			
			IKK 9.4.3.B	Rasio beroperasinya fasilitas penimbangan untuk mendukung keselamatan	Rasio	0.636	-			
5	SK 13	Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal	IKK 13.1.3.A	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,38	3,38			
			IKK 13.1.3.B	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	82,3	83,51			
			IKK 13.1.3.C	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	94,10	-			

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2025 (Baseline)	Realisasi 2025	Target Renstra 2025	Target 2025	Keterangan
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
			IKK 13.1.3.D	Indeks Pengelolaan Aset	Nilai	3,20	-			
6	SK 14	Meningkatnya Layanan Perkantoran	IKK 14.1.3	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	85,51	-			

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:3261-0022-8642-1157

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 022.03.1.352597/2025

Revisi ke 04
Tanggal : 23 April 2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(022)	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2. Unit Organisasi	:	(03)	Ditjen Perhubungan Darat
3. Provinsi	:	(01)	DKI JAKARTA
4. Kode/Nama Satker	:	(352597)	DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
Sebesar	:	Rp. 67.733.026.000	(ENAM PULUH TUJUH MILIAR TUJUH RATUS TIGA PULUH TIGA JUTA DUA PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
04 EKONOMI
04.08 TRANSPORTASI
Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	49.639.364.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	18.093.662.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN JAKARTA IV (133) Rp. 67.733.026.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2025

DS:3261-0022-8642-1157

Satker : (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

GA	Program Infrastruktur Konektivitas	Rp.	46.489.102.000
GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	46.489.102.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	21.243.924.000
WA.4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp.	610.670.000
WA.4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	20.633.254.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:3261-0022-8642-1157

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

Program	:	022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas				46.489.102.000
Kegiatan	:	4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat				46.489.102.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4640.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		18,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	28.551.000.000
Rincian Output	:	01 ABF.001	Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana		18.00	Rekomendasi Kebijakan	28.551.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4640.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		32,00	Laporan, Rekomendasi	12.938.102.000
Rincian Output	:	01 FAE.923	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		32.00	Laporan	12.938.102.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	4640.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		2,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	5.000.000.000
Rincian Output	:	01 PBF.209	Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya) (Prioritas Nasional)	(PN)	1.00	Kajian	2.500.000.000
		02 PBF.210	Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Subing) (Prioritas Nasional)	(PN)	1.00	Kajian	2.500.000.000
Program	:	022.03.WA	Program Dukungan Manajemen				21.243.924.000
Kegiatan	:	4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat				610.670.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4596.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		6,00	Unit, m2, Paket	610.670.000
Rincian Output	:	01 EBB.906	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi		6.00	unit	610.670.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:3261-0022-8642-1157

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

Kegiatan	: 4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat				20.633.254.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output 2	: 4670.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		5.547.254.000
Rincian Output	: 01 EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan		5.547.254.000
Klasifikasi Rincian Output 3	: 4670.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	3,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		15.086.000.000
Rincian Output	: 01 EBD.909	Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	3.00	Laporan		15.086.000.000

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N MENTERI PERHUBUNGAN
DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT

ttd.

Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K.
NRP. 66110433

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2025

DS:3261-0022-8642-1157

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

						Pagu		Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	67.733.026.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$ 0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	49.639.364.000			(2) RPLN	US$ 0	Rp.	0
2. PNBP	Rp.			b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$ 0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0			(2) RHLN	US$ 0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR 0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR 0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR 0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR 0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:3261-0022-8642-1157

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
352597	**DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN**	**-**	**50.274.796**	**17.458.230**	**-**	**-**	**67.733.026**		
022.03.GA	**Program Infrastruktur Konektivitas**	**-**	**29.641.542**	**16.847.560**	**-**	**-**	**46.489.102**		
4640	**Penunjang Teknis Transportasi Darat**	**-**	**29.641.542**	**16.847.560**	**-**	**-**	**46.489.102**		
4640.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	11.703.440	16.847.560	-	-	28.551.000	01 . 51	
01	RM	-	8.700.000	3.700.000	-	-	12.400.000	133@	
04	PNBP	-	3.003.440	13.147.560	-	-	16.151.000	133@	
4640.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	12.938.102	-	-	-	12.938.102	01 . 51	
01	RM	-	10.995.440	-	-	-	10.995.440	133@	
04	PNBP	-	1.942.662	-	-	-	1.942.662	133@	
4640.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	01 . 51	
01	RM	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	133@	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:3261-0022-8642-1157

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
022.03.WA	**Program Dukungan Manajemen**	-	**20.633.254**	**610.670**	-	-	**21.243.924**		
4596	**Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat**	-	-	**610.670**	-	-	**610.670**		
4596.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	-	610.670	-	-	610.670	01 . 51	
01	RM	-	-	610.670	-	-	610.670	133@	
4670	**Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat**	-	**20.633.254**	-	-	-	**20.633.254**		
4670.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	5.547.254	-	-	-	5.547.254	01 . 51	
01	RM	-	5.547.254	-	-	-	5.547.254	133@	
4670.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	15.086.000	-	-	-	15.086.000	01 . 51	
01	RM	-	15.086.000	-	-	-	15.086.000	133@	
	JUMLAH	-	**50.274.796**	**17.458.230**	-	-	**67.733.026**		

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N MENTERI PERHUBUNGAN
DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT

ttd.

Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K.
NRP. 66110433

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:3261-0022-8642-1157

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	352597	**DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	677.922	662.043	849.786	1.002.107	759.623	674.681	625.845	611.907	583.729	688.539	724.769	59.872.075	67.733.026
		BELANJA BARANG	677.922	662.043	849.786	1.002.107	759.623	674.681	625.845	611.907	583.729	688.539	724.769	42.413.845	50.274.796
		BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.458.230	17.458.230
	022.03.GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	145.433	400.384	612.967	294.495	328.252	314.372	270.536	256.598	228.420	311.560	381.648	42.944.438	46.489.102
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	145.433	400.384	612.967	294.495	328.252	314.372	270.536	256.598	228.420	311.560	381.648	26.096.878	29.641.542
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.847.560	16.847.560
	022.03.WA.4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610.670	610.670
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610.670	610.670
	022.03.WA.4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	532.490	261.659	236.819	707.612	431.371	360.309	355.309	355.309	355.309	376.979	343.121	16.316.967	20.633.254
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	532.490	261.659	236.819	707.612	431.371	360.309	355.309	355.309	355.309	376.979	343.121	16.316.967	20.633.254

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N MENTERI PERHUBUNGAN
DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT

ttd.

Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K.
NRP. 66110433

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2025
IV A. B L O K I R

DS:3261-0022-8642-1157

Kementerian Negara/Lembaga : [022] KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : [03] Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [352597] DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN		
352597	**DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN**		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan	Rp.	59.114.261
	52 Belanja Barang	Rp.	41.656.031
	53 Belanja Modal	Rp.	17.458.230
022.03.GA	**Program Infrastruktur Konektivitas**		
4640	**Penunjang Teknis Transportasi Darat**		
4640.ABF	**Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana**		
	521119 Belanja Barang Operasional Lainnya(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	8.700.000
	Efisiensi Anggaran		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	521119 Belanja Barang Operasional Lainnya(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	3.003.440
	Efisiensi Anggaran		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	536111 Belanja Modal Lainnya(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	3.700.000
	Efisiensi Anggaran		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	536111 Belanja Modal Lainnya(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	13.147.560
	Efisiensi Anggaran		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
4640.FAE	**Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan**		
	521119 Belanja Barang Operasional Lainnya(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	687.233
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

KODE	URAIAN		
	521119 Belanja Barang Operasional Lainnya(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	75.000
	Efisiensi Anggaran		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	521211 Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	611.275
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	521211 Belanja Bahan(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	201.790
	Efisiensi Anggaran		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	90.705
	Efisiensi Anggaran		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	1.644.425
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	191.331
	Efisiensi Anggaran		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	522141 Belanja Sewa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	15.000
	Efisiensi Anggaran		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2025
IV A. B L O K I R

DS:3261-0022-8642-1157

Kementerian Negara/Lembaga : [022] KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : [03] Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [352597] DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN		KODE	URAIAN	
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 432.819		Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 156.950
	Efisiensi Anggaran			Efisiensi Anggaran	
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)		**4640.PBF**	**Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana**	
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 22.200		521119 Belanja Barang Operasional Lainnya(RM)	
	Efisiensi Anggaran			Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 5.000.000
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Efisiensi Anggaran	
	522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)			Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 500.000	**022.03.WA**	**Program Dukungan Manajemen**	
	Efisiensi Anggaran		**4596**	**Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat**	
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		**4596.EBB**	**Layanan Sarana dan Prasarana Internal**	
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)			532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(RM)	
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 2.705.732		Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 610.670
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Efisiensi Anggaran	
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		**4670**	**Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat**	
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 508.005	**4670.EBA**	**Layanan Dukungan Manajemen Internal**	
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)	
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 51.420
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)			Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 386.475		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Efisiensi Anggaran			524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 271.958
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)			Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 1.579.273		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Efisiensi Anggaran			524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)	
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 150.000
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)			Efisiensi Anggaran	
				Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2025
IV A. B L O K I R

DS:3261-0022-8642-1157

Kementerian Negara/Lembaga : [022] KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : [03] Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [352597] DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 150.000 Efisiensi Anggaran Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 250.000 Efisiensi Anggaran Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
4670.EBD	**Layanan Manajemen Kinerja Internal** 522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 14.271.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N MENTERI PERHUBUNGAN
DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT

ttd.
Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K.
NRP. 66110433

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2025
IV B. C A T A T A N

DS:3261-0022-8642-1157

Kementerian Negara/Lembaga : [022] KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : [03] Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [352597] DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N MENTERI PERHUBUNGAN
DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT

ttd.
Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K.
NRP. 66110433